

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Blora

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Blora

Kabupaten Blora merupakan wilayah yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan yang memiliki ketinggian yaitu 20 meter-280 meter diatas permukaan laut. Bagian utara kabupaten Blora merupakan kawasan perbukitan kapur, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Bagian selatan juga berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan yang terletak di provinsi jawa timur. Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara yang merupakan kawasan padat penduduk dan kawasan perkantoran. Kantor yang dimaksudkan adalah kantor pemerintah daerah, kantor perbankan dan gedung sekolah (Blorakab.go.id, 2017).

Sepuluh dari wilayah Kabupaten Blora yaitu merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur, dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah kawasan kabupaten ini umumnya merupakan areal persawahan, yang sebagian besar dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat penduduk setempat. Sawah di Kabupaten Blora sebagian besar merupakan areal sawah tadah hujan dimana masyarakat hanya menggantungkan intensitas hujan untuk menggarap sawah mereka.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air baik yang digunakan untuk air minum maupun untuk irigasi persawahan pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Sementara pada musim penghujan, rawan banjir longsor di sejumlah kawasan. Banjir ini disebabkan karena sebagian kawasan yang seharusnya berupa hutan resapan, akan tetapi untuk saat ini hutan resapan untuk kawasan Kabupaten Blora sudah sangat berkurang. Kali Lusi merupakan sungai terbesar di Kabupaten Blora, bermata air di Pegunungan Kapur Utara yang terletak di kawasan Kabupaten Rembang, kemudian air sungai mengalir ke arah barat melintasi kota Purwodadi yang akhirnya bergabung dengan Kali Serang. Kali Lusi sendiri sebagian besar digunakan warga masyarakat untuk pengairan sawah dan untuk sarana memancing bagi warga di sebagian aliran sungai (Blorakab.go.id, 2017).

2.1.2 Luas Wilayah dan administrasi Kabupaten Blora

Terkait dengan luas wilayah itu sendiri, Kabupaten Blora terdiri atas 16 kecamatan dan terdapat sebanyak 271 desa dan 24 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Blora. Di samping Blora, banyak kecamatan lain yang menjadi kecamatan unggulan selain kecamatan Blora, diantaranya yaitu kecamatan Cepu, Kecamatan Tunjungan, dan Kecamatan Jepon (RPJMD. 2015).

Berikut adalah kecamatan di Kabupaten Blora:

1. Kota Blora memiliki luas kawasan sebesar 79,786 Km²
2. Cepu memiliki luas kawasan sebesar 49,145 Km²
3. Randublatung memiliki luas kawasan sebesar 211,13 Km²

4. Kunduran memiliki luas kawasan sebesar 127,983 Km²
5. Jepon memiliki luas kawasan sebesar 107,724 Km²
6. Ngawen memiliki luas kawasan sebesar 100,982 Km²
7. Jati memiliki luas kawasan sebesar 183,621 Km²
8. Jiken memiliki luas kawasan sebesar 168,167 Km²
9. Banjarejo memiliki luas kawasan sebesar 103,522 Km²
10. Bogorejo memiliki luas kawasan sebesar 49,505 Km²
11. Japah memiliki luas kawasan sebesar 103,052 Km²
12. Kradenan memiliki luas kawasan sebesar 109,508 Km²
13. Kedungtuban memiliki luas kawasan sebesar 106,858 Km²
14. Sambong memiliki luas kawasan sebesar 88,750 Km²
15. Todanan memiliki luas kawasan sebesar 128,739 Km²
16. Tunjungan memiliki luas kawasan sebesar 101,815 Km²

Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan. Secara administratif terletak di wilayah paling ujung (bersama Kabupaten Rembang) disisi timur Propinsi Jawa Tengah. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 57 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 58 km (Blorakab.go.id, 2017).

Batas Astronomis

Batas astronomis Kabupaten Blora terletak di antara $111^{\circ}016'$ s/d $111^{\circ}338'$ Bujur Timur dan diantara $6^{\circ}528'$ s/d $7^{\circ}248'$ Lintang Selatan.

Batas Administratif

Di kawasan kabupaten blora, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Kemudian untuk kawasan bagian sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur. Untuk kawasan bagian selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Kawasan bagian barat juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan

2.2 Visi dan Misi Kabupaten Blora

Visi

Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat

Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN, dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan sumber daya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ramah lingkungan dan berkesinambungan
 3. Meningkatkan iklim yang kondusif dan bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran;
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan kearifan lokal;
 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
 6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
 7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia (HAM)
- (Blorakab.go.id, 2017)

2.3 Sejarah Kabupaten Blora

Asal usul nama Blora

Menurut cerita rakyat yang terdapat di masyarakat, Blora berasal dari kata BELOR yang memiliki arti Lumpur, kemudian kata itu berkembang menjadi mbeloran yang kemudian akhirnya hingga sekarang lebih dikenal dengan nama BLORA. Secara etimologi, kata Blora berasal dari kata WAI + LORAH. Wai artinya adalah sebagai air, dan Lorah kemudian memiliki arti sebagai jurang atau tanah rendah. Dalam bahasa Jawa sering terdapat pergantian atau persilangan huruf W dengan huruf B, dan tidak menyebabkan perubahan arti kata. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman kata WAILORAH menjadi BAILORAH, dari BAILORAH menjadi BALORA dan kata BALORA akhirnya menjadi BLORA. Jadi nama BLORA kemudian berkembang dan akhirnya memiliki arti sebagai tanah rendah yang berair, dan juga banyak sekali yang mengartikan Blora sebagai daerah yang tanahnya berlumpur (Blorakab.go.id, 2017).

Blora di Era Kerajaan

Blora dibawah Kadipaten Jipang

Di era kerajaan, pada abad ke 16 blora pada saat itu berada di bawah kepemimpinan pemerintahan kadipaten jipang dan di bawah pemerintahan kerajaan demak. Adipati jipang memiliki nama asli yaitu raden Aryo Penangsang yang kemudian lebih dikenal dengan nama Aria Jipang. Daerah kekuasaan kadipaten Jipang sendiri meliputi kawasan Pati, Lasem, Blora, dan Jipang itu sendiri. Akan tetapi setelah Jaka Tingkir atau bisa disebut dengan nama Hadiwijaya mewarisi

tahta Demak, selanjutnya pusat pemerintahan dipindah ke Pajang dan kemudian akhirnya kadipaten jipang masuk dalam kawasan yang dikuasai oleh Kerajaan Pajang (Blorakab.go.id, 2017).

Blora dibawah Kerajaan Mataram

Pemerintahan Kerajaan Pajang dalam memerintah tidak berlangsung lama, karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kotagede, Yogyakarta. Selanjutnya kawasan Blora termasuk wilayah Mataram bagian Timur atau daerah Bang Wetan. Pada masa pemerintahan Paku Buwana I (1704-1719) daerah Blora diberikan kepada putranya yang bernama Pangeran Blitar dan diberi gelar Adipati. Luas Blora pada saat itu 3.000 karya (1 karya = hektar). Kemudian pada tahun 1719-1727 Kerajaan Mataram dipimpin oleh raja Amangkurat IV, sehingga sejak masa saat itu daerah Blora berada di bawah pemerintahan raja Amangkurat IV (Blorakab.go.id, 2017).

Blora di Jaman Perang Mangkubumi (tahun 1727 - 1755)

Pada saat Mataram di bawah kepemimpinan Paku Buwana II (1727-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Mangku Bumi dan Mas Sahid, dan kemudian Mangku Bumi berhasil menguasai Sukawati, Grobogan, Demak, Blora, dan Yogyakarta. Akhirnya Mangku Bumi diangkat dan dinobatkan oleh rakyatnya menjadi Raja di Yogyakarta. Berita dari Babad Giyanti dan Serat Kuntharatama menyatakan bahwa Mangku Bumi menjadi Raja pada tanggal 1 Sura tahun Alib 1675, atau 11 Desember 1749. Dengan demikian, bersamaan dengan diangkatnya Mangku Bumi menjadi Raja dan berkuasa, maka diangkat pula pejabat yang lain,

diantaranya adalah para pemimpin prajurit Mangkubumen, yaitu Wilatikta, yang kemudian diangkat menjadi Bupati Blora (Blorakab.go.id, 2017).

Blora dibawah Kasultanan

Perang Mangku Bumi diakhiri dengan adanya perjanjian Giyanti yaitu pada tahun 1755, yang terkenal dengan nama palihan negari, karena dengan adanya perjanjian tersebut kemudian Mataram terbagi menjadi dua kerajaan, yang pertama yaitu Kerajaan Surakarta di bawah Paku Buwana III, dan yang kedua Kerajaan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengku Buwana I. Di dalam Palihan Negari itu, daerah Blora termasuk dalam wilayah Kasunanan yaitu sebagai bagian dari daerah Mancanegara Timur, dalam kepemimpinan Kasunanan Surakarta. Akan tetapi setelah adanya kejadian tersebut, Bupati Wilatikta tidak setuju dengan perjanjian tersebut untuk masuk menjadi daerah Kasunanan, sehingga kemudian Bupati Wilatikta memilih untuk mundur dari jabatannya (Blorakab.go.id, 2017).

BLORA KABUPATEN

Blora sebagai Kabupaten

Sejak zaman kerajaan Pajang sampai dengan zaman kerajaan Mataram, Kabupaten Blora adalah salah satu daerah yang penting bagi Pemerintahan Pusat Kerajaan, hal ini disebabkan karena Blora terkenal dengan hasil alamnya, yaitu hutan jatinya. Kabupaten Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi daerah Kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, kemudian tanggal 11 desember sampai

sekarang dikenal dengan Hari Jadi Kabupaten Blora. Adapun Bupati pertamanya adalah Wilatikta (Blorakab.go.id, 2017).

Perjuangan Rakyat Blora menentang Penjajahan

Pada zaman penjajahan, masyarakat blora bukan tanpa perlawanan dengan para penjajah. Perlawanan masyarakat blora kemudian dipelopori oleh para petani yang muncul pada akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Perlawanan petani ini tak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu. Pada tahun 1882, pemerintah Belanda menerapkan sistem pajak kepada masyarakat, pajak kepala yang diterapkan oleh Pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah khususnya para petani yang menggantungkan hidupnya di sektor sawah. Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani, seperti peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang dua tahun kemudian seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang dipelopori oleh Samin Surasentiko.

Gerakan Samin selanjutnya dianggap sebagai gerakan petani anti kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan masyarakat yang tidak melakukan pemberontakan secara radikal. Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah antara lain adanya pemberlakuan berbagai macam di daerah Blora. Selanjutnya adanya perubahan pola pemakaian tanah, adanya pembatasan dan pengawasan yang dilakukan oleh koloni Belanda terkait penggunaan hasil hutan oleh penduduk. Indikator-indikator yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat mempunyai hubungan secara langsung dengan gerakan protes petani yang ada di daerah Blora. Gerakan ini mempunyai

corak yang sama dengan Millinarisme, yaitu gerakan masyarakat yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan kemakmuran secara merata.

2.4 Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Blora

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menghitung kinerja perekonomian pada suatu tahun fiskal dengan menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB ADHK atas dasar harga konstan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora cenderung dinamis dalam kurun waktu tahun 2011-2014. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blora tercatat sebesar 4,39%, mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,36%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora masih dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 4,81 di tahun 2014 (RPJMD. 2015).

Pada tahun 2014 prosentase penduduk miskin Kabupaten Blora sebesar 13,66%, turun dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 14,64%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Blora masih berada sedikit di atas Jawa Tengah yang tercatat 13,58 persen. Selama 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Blora telah mengentaskan kemiskinan ± 31,26 ribu jiwa penduduk dengan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri, BLT, Jaminan Sosial dan kesehatan.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, jumlah permintaan tenaga kerja di Kabupaten Blora tidak seimbang dengan jumlah penawaran tenaga kerja yang ada. Jumlah penawaran tenaga kerja baru berkisar 2.716-4.070 setiap tahunnya,

sedangkan jumlah permintaan tenaga kerja hanya berkisar antara 890-1579 orang. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perluasan lapangan kerja di semua sektor untuk mengurangi kesenjangan tersebut (RPJMD. 2015).

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora selama 5 tahun terakhir ini nilainya terus meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut masih lebih rendah dibandingkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pencapaian UMK lebih dari KHL baru pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2015 tercatat nilai UMK sebesar Rp. 1.180.000 dengan KHL sebesar Rp 1.156.492. Dengan kenaikan upah UMK yang lebih besar dari KHL diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat secara layak sehingga bisa mensejahterakan ekonomi di kalangan pekerja (RPJMD. 2015)

Pembangunan pada urusan sosial masih dihadapkan pada masalah banyaknya PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial). Jumlah fakir miskin di Kabupaten Blora terus mengalami trend peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 PMKS yang paling banyak adalah fakir miskin dengan jumlah 340.055 jiwa, kemudian Komunitas adat terpencil sebanyak 14.603 jiwa, lanjut usia terlantar sebanyak 8.744 jiwa, perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 3.397 jiwa, dan anak terlantar sebanyak 668 jiwa.

Penanganan PMKS menjadi tanggung jawab bersama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selain penanganan PMKS, perlu dilakukan pula upaya pencegahan agar jumlah PMKS tidak terus bertambah (RPJMD. 2015).

2.5 Gambaran umum kantor KPU Blora

2.5.1 Visi dan misi Komisi Pemilihan Umum

Visi:

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas profesional, mandiri, transparan dan kuntabel, demi terciptanya demokrasi indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan republik indonesia.

Misi:

1. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
2. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan umum yang bersih, efisien, dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat indonesia yang demokratis.

2.5.2 struktur organisasi KPU Kabupaten Blora



Sumber: KPU Blora

KPU Kabupaten Blora terdiri dari 5 orang komisioner, yang diketuai oleh M Hamdun SPd.I, dan dianggotai oleh Achmad Husain ST., Muhamad Syaiful Amri, S.IP, Heni Rina Minarti, Nailina Paramita N, S.IP. kemudian sekretaris yaitu Suharto S.E., M.Si. kepala sub bagian keuangan, umum dan logistik yaitu Eddy Sumarno, S.Sos., kepala sub bagian hukum yaitu Saefuddin, S.H, M.Hum., kepala

sub bagian teknis pemilu dan Hupmas yaitu Edi Purwantoro S.E., dan kepala sub bagian program dan data yaitu Any Sri Rahayu, S.E.

2.5.3 Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten

KPU kabupaten bertugas untuk :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenuan peraturan perundang-undangan
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten / kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi.

- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sampai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu,

putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 profil pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jateng

Profil Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023		PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023	
<p>NOMOR URUT 1</p> <p>CALON GUBERNUR H. GANJAR PRANOWO, S.H, MIP Tempat & Tanggal Lahir : Karanganyar, 28 Oktober 1968 Pekerjaan/Jabatan : Gubernur Jawa Tengah periode 2014-2019 Terakhir : Jalan Gubernur Budiono No. 8 Gajamungkur, Semarang</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR H. TAJ YASIN Tempat & Tanggal Lahir : Rembang 2 Juli 1963 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 Terakhir : Ds. Karangmangu RT 04 RW 01, Sarang, Rembang</p>		<p>1</p>  <p>CALON GUBERNUR H. GANJAR PRANOWO, S.H, MIP</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR H. TAJ YASIN</p>	
<p>NOMOR URUT 2</p> <p>CALON GUBERNUR SUDIRMAN SAID Tempat & Tanggal Lahir : Brebes, 16 April 1963 Pekerjaan/Jabatan : Dosen Terakhir : Komplek Kowikan Blok A3 No.4 Jl. Sung Blok A3 No. 4 RT. 007/005 Kel. Seta, Kec. Cipayang, Jakarta Timur</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR Dra. IDA FAUZIYAH Tempat & Tanggal Lahir : Mojokerto, 17 Juli 1969 Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPR RI periode 2014-2019 Terakhir : Jalan Rong Riganen 900 Kav.1 RT008/RW.001 Kel. Jaktipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan</p>		<p>2</p>  <p>CALON GUBERNUR SUDIRMAN SAID</p> <p>CALON WAKIL GUBERNUR Dra. IDA FAUZIYAH</p>	
		<p>VISI : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan rakyat (petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil serta rakyat pekerja) sebagai subyek dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan serta memperkuat akses rakyat terhadap sumberdaya politik, ekonomi sosial dan budaya. 2. Memperkuat penyelenggara pemerintahan yang bersih, jujur, transparan demi terjaminnya sistem pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terciptanya relasi sosial yang aman dan tidak diskriminatif. 3. Menyelenggarakan program-program pembangunan yang menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui sinergitas kerja dan gotong royong para pemangku kepentingan. 	
		<p>VISI : Mbangun Jateng Mukti Bareng mencapai kehidupan warga Jawa Tengah yang Adil, Sejahtera, Maju dan Beradab</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan. 2. Memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, membangun sebagai gerakan. 3. Menjaga keberlanjutan, memelihara keseimbangan lingkungan. 	

Pasangan calon nomor urut 1

Calon gubernur :

Nama : H. Ganjar Pranowo SH, MIP

Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 28 oktober 1968

Alamat : Jalan Gubernur Budiyono No. 8 Gajahmungkur Semarang

Calon wakil gubernur :

Nama : H. Taj Yasin

Tempat, tanggal lahir : Rembang 2 juli 1963

Alamat : Ds. Karangmangu, RT 04 RW 01 Sarang, Rembang

Visi : menuju jawa tengah yang sejahtera dan berdikari: mboten korupsi mboten ngapusi

Misi : 1. Menempatkan rakyat (petani, nelayan, pelaku usaha mikro dan kecil serta rakyat pekerja) sebagai subjek dalam proses pengambilan

keputusan dan penentuan arah pembangunan serta memperkuat akses rakyat terhadap sumber daya politik, ekonomi sosial dan budaya.

2. memperkuat penyelenggara pemerintahan yang bersih dan jujur , transparan, demi terjaminnya sistem pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, terciptanya relasi sosial yang aman dan tidak diskriminatif.

3. menyelenggarakan program-program pembangunan yang menjamin terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui sinergitas kerja dan gotongroyong para pemangku kepentingan.

Pasangan calon nomor urut 2

Calon gubernur

Nama : Sudirman Said

Tempat, tanggal lahir : 16 april 1963

Alamat : komplek kowihan, Blok A3 No. 4 kelurahan Setu, Kecamatan cipayung, jakarta timur

Calon wakil gubernur

Nama : Dra. Ida Fauziyah

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 17 juli 1969

Alamat : Jalan raya Ragunan 100 kav. 1 RT 001 RW 001 Kel. Jatipadang kec. Pasar minggu, Jakarta Selatan

Visi : Mbangun jateng mukti bareng mencapai kehidupan warga jawa tengah yang adil, sejahtera, maju, dan beradab.

- Misi :
1. Mewujudkan pemerataan hasil pembangunan, mengurangi kesenjangan
 2. memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan, membangun sebagai gerakan
 3. menjaga keberlanjutan, memelihara keseimbangan lingkungan